

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Qamaar Nurul, dkk, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)
- Ismaya Samun, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Santoso Urip, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- _____, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Limbong Bernhard, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012)
- Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Nandang Alamsyah, *Administrasi Pertanahan*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2018)
- Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Sulistyowati Irianto Dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Anggraeni Kolopaking, Anita Dewi, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013)
- Santi, Dewi, I Gusti Ayu Gangga, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Rosalia, Feni, *Pelayanan Pemerintah Bidang Pertanahan (Pelayanan Sertifikat Hak Milik, Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2016)
- Atmadja, Gede, I Dewa, dkk, *Implikasi Yuridis Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022)
- Salim, HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2013)
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1998)
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Ginau, Maryam B, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Haryoko, Sapto, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020)
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- Supriyanto, Degdo, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Amruddin, dkk, *Manajemen Distribusi di Era Digitalisasi*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023)
- Pugung, Solahudin, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Pespektif Negara Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Khairandi, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016)

B. Jurnal

- Annisa NA, Vionica P. Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat. *J Soc Sci Res Vol.* 2024;4:1598-1608.
- Alam A, Sriwidodo J, Halim AN. Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pejabat PPAT Secara Online Penggunaan Aplikasi Kementerian Agraria Dan

- Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). *SENTRI J Ris Ilm.* 2023;2(9):3576-3588. doi:10.55681/sentri.v2i9.1507
- Wulan RR, Mustam M. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *J Public Policy Manag Rev* . 2017;6(3):259-279.
- Juprianta J, Halim AN, Yuliasara Y. Pelaksanaan Sistem Administrasi Pelayanan Publik secara Online terhadap Permohonan Hak Atas Tanah. *J Nuansa Kenotariatan*. 2019;4(2).
- Harnis W, Suryanti N, Rubiati B. Status Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas Tanpa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Acta Diurnal J Ilmu Huk Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. 2018;1(2):175. doi:10.24198/acta.v1i2.114
- Huswan SN, Borahima A, Deviani O. Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Jika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia. 2022;10(April):85-99.
- Kusmaryanto G. Pendaftaran Akta Jual Beli Yang Melebihi Jangka Waktu Pendaftaran Tanah Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *J Akunt*. 2017;11(3).
- Sibuea HYP. Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Huk*. 2011;2(2):287-306.
- Belakang AL. Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan. *J Ilm Huk Dirgant*. 2014;4(2):44-56. doi:10.35968/jh.v4i2.97
- Dewi IGS. Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah. *Pandecta Res Law J*. 2010;5(2):124. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2294%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/2294/2346>
- Ardani MN. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Adm Law Gov J*. 2019;2(3):476-492. doi:10.14710/alj.v2i3.476-492
- Anandari DH, Sulistiyono A, Suraji S. Urgensi Penyuluhan Masyarakat tentang

- Peralihan Hak atas Tanah untuk Mengurangi Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. *Pros Semin Nas Pengabdian Masy.* 2023;1. doi:10.61142/psnpm.v1.95
- Rifauddin M. Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi. *Khazanah al-Hikmah J Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan.* 2016;4(2):168-178. doi:10.24252/kah.v4i27
- Komaling EA. Tugas Dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. *Lex Priv.* 2019;VII(4):27-29.
- Sagari D, Mujiati M. Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. *Tunas Agrar.* 2022;5(1):33-46. doi:10.31292/jta.v5i1.166
- Suhartati, Basir A, Mira Nila Kusuma Dewi. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (*Overlapping*). *Alauddin Law Dev J.* 2023;5(1):175-188. doi:10.24252/aldev.v5i1.35511
- Marhel J. Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Masal Huk.* 2018;46(3):249. doi:10.14710/mmh.46.3.2017.249-256
- Pontoh VD, Junus N, Abdussamad Z. Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Jual Beli Di Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow Timur. *J Ilmu Sos Hum dan Seni.* 2023;1(3):484-489.
- Putri YA, Putera RE, Rahayu WK. Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *J Soc Policy Issues.* 2022;2:86-94. doi:10.58835/jspi.v2i2.45
- Sudiro AA, Putra AP. Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *J Magister Ilmu Huk.* 2021;5(1):22. doi:10.36722/jmih.v5i1.768
- Wibowo SG, Susanto F, Prihadyatama A, A NA. Implikasi Hukum Pengecekan Sertifikat Tanah Secara Online. *Hakim J Ilmu Huk dan Sos.* 2023;1:339-348. doi:https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1398

- Miranda Hasna Dea FXA. Efektivitas Pengurusan Pertanahan Berbasis Online Dalam Membantu Ppat Menjalankan Tugas Jabatan Oleh Notaris Dan PPAT Di Kota Bandar Lampung. *Justicia Sains J Ilmu Huk.* 2022;06.
- Wawan Supryadi. Analisis Terhadap Inovasi Pengikatan Hak Tanggungan (HT) Berbasis Elektronik Di Wilayah Kerja Kantor Badan Pertanahan Dompu. *J Innov Res Knowl.* 2022;1(9):965-980.
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/1434>
- Otentik PS. Kebijakan Pembuatan Akta PPAT Secara Elektronik : 2023;12(2).
doi:10.28946/rpt.v12i2.3110
- Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, Aris Prio Agus Santoso. Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter. *J Ilmu Sos dan Pendidik.* 2023;7(2):1175-1176.
doi:10.58258/jisip.v7i1.4825/http
- Mario J, Aditya Yuli S. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *J CREPIDO.* 2019;01:13-22.
- Silviana A. Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Adm Law Gov J.* 2021;4(1):51-68.
- Ardani MN. Langkah Kementerian ATR/BPN Menghadapi Disrupsi Digital: Dalam Telaah Filsafat Hukum. *Gema Keadilan.* 2022;9(1):19-35.
doi:10.14710/gk.2022.14551
- Maharani AD, Santoso B, Wisnaeni F. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya. *Notarius.* 2021;14(1):39-46. doi:10.14710/nts.v14i1.37600
- Rini S, Arpangi. Peranan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Perumahan. *J Ilm Sultan Agung.* 2023;2(1):hlm. 502-511.
- Suhartoyo S. Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Adm Law Gov J.* 2019;2(1):143-154. doi:10.14710/alj.v2i1.143-154
- Arisaputra MI, Ashri M, Abdullah K, Mas Bakar DU. Akuntabilitas Administrasi

- Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat. *Mimb Huk.* 2017;29(2):276.
doi:10.22146/jmh.16383
- Nafan M. Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *J Pendidik Tambusai.* 2022;6(1):3342-3355.
- Nugroho RD. Pelayanan Program Pendaftaran Mandiri Akta Tanah (Permata) Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP.* 2017;4.
- Surdin J. Analisis of *E-Government Implementation Feasibility of Public Service in Agrarian Field at Pinrang Regency.* *J Komun KAREBA.* 2016;5(1):1-14.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1892/1057>
- Nurul Farahzita, Fransiscus Xaverius Arsin. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik. *The Juris.* 2022;6(1):176-189.
doi:10.56301/juris.v6i1.428
- Erfa R. Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (*Legal Policy*) *Digitalization of Land Administration To Actualize the Acceleration of National.* *J Pertanah.* 2020;10(1):39-59.
- Aisiyah N, Erawanta T. Sistem informasi pertanahan sebagai alat untuk pengembangan. *J Magistra.* 2010;72(1):17-27.
- Kamra M. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membantu Badan Pertanahan (BPN) Melakukan Pendaftaran Tanah. *J Tana Mana.* 2024;4(1).
- Supriyadi. Kedudukan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dalam perspektif hukum pertanahan. *Arena Huk.* 2016;Volume 9 N(61):203-225.
file:///C:/Users/LAPTOP 35/Documents/Bahan Jurnal MBR/318-1138-1-PB.pdf
- Deandlles Christover, Aji Syarif Hidayattulah, Indah Mawarni. Penerapan Konsep Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *J Res Dev*

- Public Policy*. 2023;2(2):199-214. doi:10.58684/jarvic.v2i2.73
- Silviana A, Anami K, Djoko Waloejo H. Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah. *Law, Dev Justice Rev*. 2020;3(2):191-195. doi:10.14710/ldjr.v3i2.9523
- Jonaedi Efendi IGW, Lutfianingsih FF. *Istilah Hukum Popule.*; 2016.
- Rokhim A, Wiratamja N. Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia. *Huk Dan Din Masy*. 2023;21(2):43. doi:10.56444/hdm.v21i2.4067
- P. SM, Nurrokhman A. Kesiapan Data Pertanahan Menuju Pelayanan *Online*. Published online 2019.
- Triani WA, Nawis S, Abbas I. Efektivitas Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. *J Lex Gen*. 2023;4(2).
- Adinegoro KRR. Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *J Adm Publik*. 2023;19(1):26-49. doi:10.52316/jap.v19i1.135
- Ningtyas AM, Syifa Ardiansyach T, Maulana W, Bachtiar B. Cacat Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *J Ilmu Huk*. 2023;1(1):20-27.
- Jamiat J, Saliro SS, Samsul S. Upaya Mediasi dan Akibat Hukum Sengketa Pertanahan di Kantor BPN Kabupaten Sambas. *Yust MERDEKA J Ilm Huk*. 2021;7(1):46-51. doi:10.33319/yume.v7i1.70
- Nugraha JP, Kurniawan AP, Putri ID, Wicaksono RK, Tarisa T. Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Widya Bhumi*. 2022;2(2):123-135. doi:10.31292/wb.v2i2.43
- Muthohar M, Purnawan A. Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali). 2016;4(4):527-534.
- Winata MR, Agustine OV. Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir

Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *J Legis Indones.* 2019;16(4):458-476.
https://www.academia.edu/download/65340596/Rekoneksi_Hukum_dan_Disrupsi_Teknologi_Melalui_Tafsir_Konstitusional_Mendukung_Pembangunan_Ekonomi.pdf

Downey C. Book Review Regulation and Technology . Abingdon : Routledge. 2021;3(1):151-153.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang *Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kemnterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 440/SK-HR.02/III/2023 tentang *7 (Tujuh) Layanan Pertanahan Prioritas*